

**EVALUASI PENGUSULAN KENAIKAN PANGKAT APARATUR SIPIL NEGARA  
JABATAN FUNGSIONAL GURU DI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BIAK NUMFOR PROVINSI PAPUA**

YUNAN ANANDA PERDANA MANWELL DAMANIK  
NPP 30.1514

Asdaf Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua

Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik

E-mail : [yunanmanwelldmnk@gmail.com](mailto:yunanmanwelldmnk@gmail.com)

Dosen Pembimbing : Drs. Yani Alfian, M.Si

**ABSTRACT**

**Problems/Background (GAP):** This research was conducted in order to evaluate proposals for promotion to the rank of State Civil Apparatus for Teacher Functional Positions in Biak Numfor Regency. As it is known that the Functional Position of Teachers in Biak Numfor Regency often experiences delays in promotions due to factors that become obstacles in proposing promotions. This of course will reduce teacher motivation in carrying out their duties so that the quality of education in Biak Numfor Regency will decrease in the future. **Objective :** Research must be carried out in order to find out what are the inhibiting factors and to find out what efforts will be made so that suggestions can be given to overcome these problems. **Method :** The research method used to get good results is a descriptive qualitative research method with an inductive approach. By using Evaluation indicators according to William N. Dunn with a total of 5 indicators studied and also based on basic legalistic rules relating to proposing promotions and rules relating to the use of the employee performance target format (SKP) used in proposing increases rank. **Findings :** Based on the evaluation carried out on the procedure for proposing a promotion to the Functional Position of Teachers that the number of teachers who were late for promotion was due to inhibiting factors encountered in proposing an increase. This has resulted in many teachers filing complaints against the local government due to the complexity of proposing promotions each period which causes frequent delays in promotions for Functional Teacher Positions in Biak Numfor Regency, especially for teachers who live far from the city who have difficulty accessing information regarding promotion proposals. However, the Regional Government has responded to these complaints by preparing several efforts that are expected to overcome the problem of promotion for functional teacher positions in Biak Numfor Regency. **Conclusion :** From fifth the evaluation indicators studied by the researcher found inhibiting factors on 3 indicators, namely on the indicators of effectiveness, adequacy and equity while on the responsiveness indicator the researchers found out how the response of the Education and Culture Office and BKPSDM of Biak Numfor Regency was in overcoming these problems. then finally the researcher knows what the teacher gets if he is promoted on time through accuracy indicators.

**Keywords:** State Civil Apparatus, Teacher Functional Position, Promotion

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP) :** Penelitian ini dilakukan guna untuk mengevaluasi pengusulan kenaikan pangkat Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Guru di Kabupaten Biak Numfor. Sebagaimana diketahui bahwasanya Jabatan Fungsional Guru di Kabupaten Biak Numfor sering mengalami keterlambatan kenaikan pangkat karena adanya faktor – faktor yang menjadi kendala dalam mengusulkan kenaikan pangkat. Hal ini tentunya akan menurunkan motivasi guru dalam melaksanakan tugasnya sehingga kualitas pendidikan di Kabupaten Biak Numfor akan mengalami penurunan kedepannya. **Tujuan :** Penelitian harus dilaksanakan agar dapat mengetahui apa saja faktor – faktor yang menjadi penghambat serta mencari tau upaya apa yang akan dilakukan sehingga dapat diberikan saran guna mengatasi permasalahan tersebut. **Metode :** Metode penelitian yang digunakan untuk mendapatkan hasil yang baik yaitu metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan induktif. Dengan menggunakan indikator Evaluasi menurut William N. Dunn dengan jumlah 5 indikator yang diteliti dan juga didasari dengan aturan – aturan dasar legalistik yang berkaitan dengan pengusulan kenaikan pangkat serta aturan – aturan yang berkaitan dengan penggunaan format sasaran kinerja pegawai (SKP) yang digunakan dalam mengusulkan kenaikan pangkat. **Hasil/Temuan :** Berdasarkan evaluasi yang dilakukan terhadap prosedur pengusulan kenaikan pangkat Jabatan Fungsional Guru bahwa banyaknya guru – guru yang terlambat untuk naik pangkat dikarenakan adanya faktor – faktor penghambat yang ditemui dalam mengusulkan kenaikan. Hal ini menyebabkan banyak guru – guru yang mengajukan keluhan terhadap pemerintah daerah karena rumitnya pengusulan kenaikan pangkat setiap periode yang menyebabkan seringnya terjadi keterlambatan kenaikan pangkat bagi Jabatan Fungsional Guru di Kabupaten Biak Numfor terutama bagi guru – guru yang bertempat tinggal jauh dari kota yang kesulitan untuk mengakses informasi mengenai pengusulan kenaikan pangkat. Namun Pemerintah Daerah telah merespons keluhan – keluhan tersebut dengan menyiapkan beberapa upaya yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan kenaikan pangkat bagi jabatan fungsional guru di Kabupaten Biak Numfor. **Kesimpulan :** Dari kelima indikator evaluasi yang diteliti peneliti menemukan faktor – faktor penghambat pada 3 indikator yaitu pada indikator efektif, kecukupan dan pemerataan sedangkan pada indikator responsivitas peneliti mengetahui bagaimana respon Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta BKPSDM Kabupaten Biak Numfor dalam mengatasi permasalahan tersebut. kemudian yang terakhir peneliti mengetahui apa saja yang didapatkan oleh guru jika naik pangkat tepat waktu melalui indikator ketepatan.

**Kata Kunci :** Aparatur Sipil Negara, Jabatan Fungsional Guru, Kenaikan Pangkat

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kenaikan pangkat merupakan salah satu elemen dalam pembinaan karier Aparatur Sipil Negara. Kenaikan pangkat pada dasarnya bukanlah hak melainkan salah satu penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah kepada ASN selama bertugas atas prestasi dan pengabdianya kepada Negara setelah melalui persyaratan tertentu. Selain itu kenaikan pangkat merupakan salah satu faktor pendorong motivasi untuk meningkatkan kinerja ASN dikarenakan kenaikan pangkat dapat meningkatkan kesejahteraan pegawai. Oleh karena itu, banyak Aparatur Sipil Negara yang berusaha meningkatkan kinerja dan prestasinya untuk memperoleh penghargaan kenaikan pangkat tepat pada waktunya.

Berdasarkan PP nomor 12 tahun 2002 pasal 4 dijelaskan bahwa “periode kenaikan pangkat pegawai negeri sipil ditetapkan pada tanggal 1 april dan 1 oktober setiap tahun, kecuali ditentukan lain dalam pemerintah ini”. Kenaikan pangkat sendiri terbagi menjadi 2 yaitu kenaikan pangkat reguler yang diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya tidak menduduki jabatan struktural dan jabatan fungsional tertentu sedangkan kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu. Menurut anwar (2007:8), kenaikan pangkat adalah kenaikan kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang ASN berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian. Namun dalam pelaksanaannya seringkali Jabatan Fungsional Guru memiliki kendala dalam pengusulan kenaikan pangkat yang menyebabkan keterlambatan dalam kenaikan pangkat seperti yang terjadi pada kabupaten biak numfor.

Berdasarkan pra wawancara awal yang dilakukan peneliti bersama staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui media komunikasi handphone(HP) diketahui bahwa pengusulan kenaikan pangkat berjalan dengan kurang maksimal dikarenakan berkas yang diajukan untuk usul kenaikan pangkat oleh guru – guru tidak lengkap seperti belum menggunakan format SKP baru, belum disosialisasikannya penggunaan SKP terbaru dan penyusunan PAK, kepala sekolah di beberapa sekolah Kabupaten Biak Numfor belum menguasai format penilaian kinerja guru, dan dinas pendidikan dan kebudayaan belum memiliki pejabat definitif untuk penandatanganan PAK. Permasalahan ini tentunya berdampak pada motivasi kerja guru sehingga dapat mempengaruhi kualitas kerja mereka ketika bertugas di lapangan karena tujuan yang mereka inginkan yaitu naik pangkat tepat waktu tidak dapat tercapai. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk membahas serta meneliti fenomena permasalahan di atas dengan lokasi penelitian di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor. Maka peneliti mengangkat judul yaitu **“Evaluasi pengusulan kenaikan pangkat Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Guru di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua”**

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP)**

Pengusulan kenaikan pangkat bagi Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Guru di Kabupaten Biak Numfor sejatinya berjalan cukup baik akan tetapi dalam beberapa tahun terakhir seringkali adanya guru – guru yang terlambat dalam mengusulkan kenaikan pangkat. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya pejabat definitif Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal ini Kepala Dinas untuk menandatangani berkas PAK yang telah diajukan kemudian kebanyakan guru – guru sering mengajukan berkas pengusulan kenaikan pangkat secara tidak lengkap. Adapun kekurangan berkas seperti berkas – berkas yang diajukan belum dilegalisir serta belum mendapatkan cap basah namun yang paling sering ditemui yaitu penggunaan format SKP masih menggunakan yang lama sehingga berkas – berkas yang diajukan harus dikembalikan untuk segera dilengkapi. Tetapi kebanyakan dari guru – guru tersebut selalu lambat dalam melengkapi berkas terkhususnya untuk mengganti format SKP hal ini dikarenakan banyak guru – guru yang masih belum memahami pembuatan format SKP terbaru akibat minimnya sosialisasi format SKP terbaru dan juga perubahan regulasi SKP dengan cepat. Sedangkan untuk guru – guru yang bertempat tinggal jauh dari kota tentunya membutuhkan waktu serta tenaga untuk mengurus berkas pengusulan kenaikan pangkat karena pengusulan berkas masih dilakukan secara manual belum secara online karena keterbatasan kualitas jaringan yang belum memadai serta masih banyak guru – guru yang belum memahami penggunaan alat – alat komunikasi seperti komputer, laptop ataupun smartphone.

## **1.3 Penelitian Terdahulu**

Menurut penelitian dari Azmi Chairunissa dkk (2021) yang berjudul Analisis Penetapan Angka Kredit Kenaikan Jabatan Fungsional Guru Sman/Smkn Di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat bahwa guru yang akan mengikuti kegiatan penetapan angka kredit harus mengupload berkas pada aplikasi OPAK. Guru harus memenuhi syarat untuk mengikuti kegiatan penetapan angka kredit seperti PKB, PKG, PAK terakhir, SK, ijazah, karya tulis ilmiah, sertifikat pendidik, impassing bagi PAK yang sudah kadaluarsa dan lain-lain.

Menurut penelitian Agus Iskandar (2018) yang berjudul Implementasi Ketentuan Kenaikan Pangkat Tenaga Fungsional Guru dengan lokasi studi di Kabupaten Kota Bumi Lampung Utara bahwa implementasi kenaikan pangkat guru dari pembina (IV/a) ke Pembina TK.I (IV/b) belum dapat berhasil sepenuhnya di mana berbagai faktor menjadi penyebab yaitu sistem koordinasi dilakukan oleh dua instansi yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/ Propinsi dan Departemen Pendidikan Nasional yaitu pada satu sisi pembagian tugas, penempatan dan promosi dilakukan oleh pihak Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/ Propinsi, sedangkan penilaian atau penetapan angka kredit dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional.

Menurut penelitian dari Rr.Sri Kartikowati dkk (2017) yang berjudul Implementasi Permenpan Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya dengan lokasi studi di SDN Kecamatan Kandis Kabupaten Siak bahwa Pemahaman guru Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III dan IV di Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Kandis Kabupaten Siak masuk kategori kurang terhadap isi Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Guru Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III dan IV di Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Kandis Kabupaten Siak mengerti prosedur kenaikan

pangkat hanya saja terkendala kenaikan pangkat karena guru diharuskan membuat publikasi ilmiah (PTK). Dampak implementasi Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 bisa bersifat positif berupa pengembangan karir seperti promosi dalam jabatan dan bersifat negatif berupa tidak dibayarkannya tunjangan profesi guru jika tidak bisa naik pangkat dalam kurun waktu 6 tahun.

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Pada penelitian ini peneliti memfokuskan pada pengusulan kenaikan pangkat bagi Jabatan Fungsional Guru di Kabupaten Biak Numfor dengan melakukan evaluasi menggunakan teori evaluasi menurut William N. Dunn (2000) dengan menggunakan 5 indikator yang dinilai. Serta permasalahan yang ditemui berdasarkan lokasi penelitian ini belum pernah diteliti oleh penelitian – penelitian sebelumnya. Penelitian ini juga dilakukan dengan mendapatkan informasi dan berdasarkan kondisi terbaru selama pelaksanaan penelitian langsung di lapangan yaitu pada bulan januari tahun 2023.

#### **1.5 Tujuan**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengusulan kenaikan pangkat bagi Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Guru di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat yang menjadi kendala dalam pengusulan kenaikan pangkat bagi Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Guru di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor-faktor penghambat dalam pengusulan kenaikan pangkat bagi Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Guru di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan induktif yang berguna untuk mengevaluasi serta mendeskripsikan permasalahan yang terjadi serta untuk membantu memahami suatu kejadian atau permasalahan yang terjadi di lapangan. Adapun sumber data yang peneliti peroleh melalui sumber data primer dengan klasifikasi yaitu narasumber, peristiwa atau aktivitas, tempat atau lokasi serta dokumen atau arsip. Teknik sampling yang peneliti gunakan untuk mendapatkan informasi dari informan melalui wawancara yaitu teknik purposive sampling yang bertujuan untuk mendapatkan informasi atau mengambil data dengan pertimbangan tertentu yang mana informan merupakan orang yang betul-betul memahami permasalahan yang terjadi di lapangan sedangkan instrumen pada penelitian ini adalah peneliti sendiri yang akan mewawancarai, mengamati dan mengolah data. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian data yang didapatkan akan dianalisis guna menghasilkan data yang lebih mendalam dan singkat dengan menggunakan tiga tahapan yaitu, 1) reduksi data 2) penyajian data 3) verifikasi atau penarikan kesimpulan.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini peneliti akan memaparkan hasil serta pembahasan yang dilakukan oleh peneliti mengenai pengusulan kenaikan pangkat bagi Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Guru di Kabupaten Biak Numfor. Adapun hasil dan pembahasan akan dijelaskan oleh peneliti melalui sub bab berikut ini.

#### **3.1 Evaluasi Pengusulan Kenaikan Pangkat Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Guru di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor**

##### **A. Efektivitas**

Pada penelitian ini peneliti menggunakan indikator efektivitas guna untuk mengukur tingkat keberhasilan pengusulan kenaikan pangkat yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Guru setiap periode. Melalui indikator ini diketahui bahwa di Kabupaten Biak Numfor dalam beberapa tahun terakhir ini guru – guru sering mengalami keterlambatan dalam mengusulkan kenaikan pangkat. Selalu ada saja hambatan maupun kendala yang dihadapi oleh guru setiap kali mencoba untuk mengusulkan kenaikan pangkat. Adapun kendala – kendala seperti penggunaan SKP format lama, tidak adanya pejabat definitif untuk penandatanganan PAK, serta pengajuan PAK yang tidak sesuai ketentuan mengakibatkan berkas – berkas pengusulan tersebut harus dikembalikan bahkan ada yang ditunda pengusulannya yang menyebabkan guru guru tersebut terlambat naik pangkat.

##### **B. Kecukupan**

Melalui indikator ini peneliti ingin mengetahui apakah tujuan dari kenaikan pangkat tepat waktu telah dirasakan oleh keseluruhan guru. Nyatanya pada beberapa tahun terakhir tujuan tersebut belum tercapai sepenuhnya karena masih adanya guru – guru yang terlambat dalam mengusulkan kenaikan pangkat maupun yang tidak mengusulkan pangkat. Hal ini terjadi karena pengusulan kenaikan pangkat yang dirasa cukup rumit oleh sebagian besar guru dan banyaknya guru – guru yang bertempat tinggal jauh dari kota kesulitan untuk mengakses informasi pengusulan kenaikan pangkat dikarenakan kualitas jaringan yang kurang memadai. Sehingga adanya guru – guru yang bekerja sampai memasuki batas usia pensiun tanpa melaksanakan kewajibannya untuk mengusulkan kenaikan pangkat.

##### **C. Pemerataan**

Dari indikator ini diketahui bahwa masih adanya kepala sekolah dan guru yang belum memahami penyusunan SKP dan PAK. Hal ini terjadi karena penggunaan format SKP terbaru serta tata cara penyusunan PAK belum disosialisasikan dengan baik karena tidak adanya pejabat definitif kepala dinas pendidikan dan kebudayaan. Terlebih lagi perubahan regulasi format SKP yang begitu cepat sehingga diperlukan waktu untuk penyesuaian sebelum disosialisasikan ke seluruh sekolah di Kabupaten Biak Numfor. Namun pada awal tahun ini Bkpsdm akan melakukan sosialisasi mengenai format SKP terbaru yang digunakan serta mensosialisasikan mengenai tata cara menyusun dan menghitung PAK agar kepala sekolah beserta guru – guru dapat memahami hal tersebut demi kebaikan dalam proses pengusulan kenaikan pangkat nantinya.

#### **D. Responsivitas**

Dilihat dari indikator ini bahwasanya proses pengusulan kenaikan pangkat di Kabupaten Biak Numfor sebenarnya sudah berjalan dengan baik dengan banyaknya guru – guru yang merespon dengan mengusulkan kenaikan pangkat setiap periodenya. Hanya saja adanya kendala – kendala yang sering terjadi belakangan ini menyebabkan adanya guru – guru yang mengalami keterlambatan kenaikan pangkat. Mengenai keterlambatan kenaikan pangkat yang dialami oleh Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Guru Sejumlah upaya sedang dipersiapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor dan juga Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk mengatasi permasalahan tersebut. Adapun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Biak Numfor mengenai upaya – upaya serta mencari solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang sering dihadapi oleh guru dalam mengusulkan kenaikan pangkat.

#### **E. Ketepatan**

Melalui indikator ini peneliti merasa bahwa kenaikan pangkat sangat berpengaruh dan memiliki dampak positif untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Bahwa pentingnya kenaikan pangkat bagi seorang guru karena dapat meningkatkan kesejahteraan serta memperbaiki kualitas ekonomi. Adapun beberapa hal positif yang akan diterima yaitu 1) Nominal gaji yang diterima berubah dikarenakan jika naik pangkat tepat pada waktunya otomatis penghasilan seorang guru akan bertambah, kemudian yang ke 2) Mendapatkan sertifikasi berupa tambahan gaji untuk guru yang memiliki jabatan fungsional, yang terakhir 3) Mendapatkan tunjangan tambahan penghasilan pegawai. Maka diharapkan bagi Pemerintah Kabupaten Biak Numfor terkhusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor agar segera mengatasi permasalahan pada guru – guru yang terlambat dalam mengusulkan kenaikan pangkat dan juga untuk guru – guru malas mengusulkan kenaikan pangkat.

### **3.2 Faktor Penghambat Dalam Mengusulkan Kenaikan Pangkat Bagi Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Guru di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor**

#### **A. Perubahan regulasi SKP dengan cepat**

Sasaran kinerja pegawai atau yang biasa disingkat SKP merupakan format yang berisikan lembar penilaian kinerja untuk seorang guru yang harus diisi oleh atasan langsung dalam hal ini merupakan tugas seorang kepala sekolah. Format mengenai penyusunan SKP sendiri diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Reformasi dan Birokrasi setiap tahunnya dan biasanya mengalami perubahan, sehingga setiap tahunnya Aparatur Sipil Negara harus siap untuk melakukan penyesuaian terhadap regulasi SKP terbaru. Perubahan – perubahan tersebut terjadi karena merupakan upaya dari Kemendagri – RB untuk menemukan cara mengukur kinerja pegawai yang tepat. Namun di Kabupaten Biak Numfor penyesuaian terhadap format SKP terbaru terbilang lambat dikarenakan kurangnya akses informasi dan juga sosialisasi mengenai perubahan regulasi SKP terbaru.

## **B. Belum adanya pejabat definitif**

Sejak tanggal 15 Oktober 2019 jabatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Di Kabupaten Biak Numfor belum memiliki pejabat yang dilantik secara definitif. Hal ini terjadi karena sejak Bupati Biak Numfor dilantik secara definitif pada tahun 2019 beliau belum bisa melantik pejabat eselon 3 dan 4 secara definitif dikarenakan kepemimpinan beliau setelah pilkada harus mencapai 6 bulan. Kekosongan jabatan ini tentu berpengaruh dalam pengusulan kenaikan pangkat Jabatan Fungsional Guru. Karena salah satu syarat untuk naik pangkat yaitu adanya penetapan PAK oleh pejabat definitif yang berwenang. Ketiadaan pejabat definitif khususnya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Sekretaris Daerah menjadi salah satu faktor yang menghambat kenaikan pangkat Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Guru yang membuat penandatanganan PAK menjadi tertunda dan harus menunggu sampai adanya pejabat definitif yang dilantik untuk segera menetapkan dan menandatangani PAK sebagai salah satu syarat untuk naik pangkat bagi Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Guru.

## **C. Belum paham pembuatan SKP baru dan PAK**

Salah satu syarat agar seorang guru bisa naik pangkat tepat waktu dengan adanya SKP beserta PAK yang telah ditetapkan oleh pejabat definitif. Tetapi fakta yang terjadi pada Kabupaten Biak Numfor yaitu sebagian guru sering mengalami kendala dalam penyusunan SKP maupun PAK. kebanyakan guru – guru belum memahami mengenai penyusunan SKP terbaru dan juga belum mahir dalam menyusun PAK. Keterbatasan sosialisasi dan juga minimnya informasi yang diterima oleh sebagian guru tersebut menyebabkan mereka kesulitan dalam menyusun SKP dan juga PAK mereka sendiri sehingga pembuatan kedua komponen tersebut harus diserahkan kepada orang lain. Yang mana menurut peneliti hal ini tidak efisien dan efektif dikarenakan akan memakan waktu apabila banyak guru yang menyerahkan pembuatan SKP dan PAK kepada orang lain bukannya membuat sendiri.

## **D. Terkendala sistem informasi**

Kualitas sebuah sistem informasi tergantung kepada seberapa baik kualitas jaringan yang digunakan. Kabupaten Biak Numfor sendiri memiliki 19 distrik yang aktif tetapi kualitas jaringan dimiliki tidak cukup merata sehingga hal ini berpengaruh dalam kualitas pemberian sistem informasi kepada setiap Aparatur Sipil Negara. Sehingga menyebabkan sistem pelayanan kenaikan pangkat belum dapat terdigitalisasi maka pelayanan kenaikan pangkat harus dilakukan secara manual. Hal ini tentu berdampak dalam pemberian informasi kepada Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Guru yang ingin mengusulkan kenaikan pangkat. Dapat dipahami bahwa kualitas jaringan yang tidak merata menyebabkan pelayanan sistem informasi kenaikan pangkat belum terdigitalisasi. Hal ini menyebabkan guru – guru yang bertempat tinggal jauh dari kota harus menempuh perjalanan ke kota untuk mengakses informasi dan juga mengusulkan kenaikan pangkat.

### **3.3 Upaya Yang Dilakukan Oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dalam Mengatasi Permasalahan Pengusulan Kenaikan Pangkat Bagi Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Guru**

#### **A. Adanya pelantikan pejabat definitif**

Kekosongan jabatan eselon 3 dan 4 menjadi salah satu faktor penundaan penetapan PAK. Pemerintah Kabupaten Biak Numfor menyadari hal tersebut sehingga segera pada tahun 2022 dilakukan kegiatan lelang jabatan untuk pejabat eselon 3 dan 4 agar mengisi kekosongan jabatan pada Pemerintahan Kabupaten Biak Numfor salah satunya yaitu posisi jabatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor. Hal ini menegaskan bahwa pentingnya pengisian jabatan kosong terkhusus pada jabatan kepala dinas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor dengan bertujuan sebagai salah satu upaya dalam mengatasi penandatanganan PAK yang tertunda pada periode sebelumnya sehingga dapat mengatasi keterlambatan kenaikan pangkat guru di Kabupaten Biak Numfor.

#### **B. Melakukan sosialisasi pembuatan SKP terbaru**

Kegiatan sosialisasi SKP terbaru dan juga penyusunan PAK telah teragendakan dalam jadwal kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Biak Numfor. Dengan adanya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang definitif maka sosialisasi dapat dilaksanakan ke masing – masing jenjang sekolah, selain itu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Biak Numfor juga telah melakukan sosialisasi kepada masing – masing Kepala Sub Bagian Kepegawaian setiap OPD agar selanjutnya disosialisasikan oleh masing – masing OPD. Diharapkan dengan adanya sosialisasi mengenai format SKP terbaru dan juga penyusunan PAK maka setiap Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Guru mampu untuk menyusun SKP maupun PAK mereka sendiri agar kedepannya pengusulan kenaikan pangkat dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

#### **C. Melakukan koordinasi dengan BKPSDM**

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Biak Numfor mengenai keterlambatan kenaikan pangkat Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Guru. Hal ini dilakukan guna untuk mengawal dan mengawasi berkas – berkas yang diajukan oleh Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Guru ketika akan mengusulkan kenaikan pangkat nantinya.

#### **D. Membentuk program kerja P2K**

Percepatan Pelayanan Kepegawaian atau yang disingkat dengan P2K merupakan suatu program kerja yang dibuat oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Biak Numfor yang melibatkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Program ini bertujuan untuk melakukan pelayanan kepegawaian seperti kenaikan pangkat, mutasi, ataupun lain – lain terhadap ASN Jabatan Fungsional Guru yang memiliki tempat tinggal jauh dari pusat perkotaan. Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan beserta BKPSDM menciptakan program P2K untuk membantu guru – guru yang bertempat tinggal jauh dari kota dan kesulitan untuk mengakses informasi dikarenakan kualitas jaringan yang tidak merata. Diharapkan melalui upaya ini guru – guru yang bertempat tinggal jauh dari kota bisa memperoleh informasi mengenai pelayanan kepegawaian dan bisa mengusulkan pangkat tepat pada waktunya sesuai dengan periode pengusulan.

### **3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Berdasarkan temuan pada penelitian Azmi Chairunissa Alfiaty dkk (2021) mengenai Analisis Penetapan Angka Kredit Kenaikan Jabatan Fungsional Guru SMAN/SMKN di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yaitu permasalahan mengenai penggunaan aplikasi OPAK yang akan error ketika diakses oleh banyak orang kemudian anggaran yang terbatas serta banyak guru yang tidak memenuhi syarat dalam penetapan angka kredit. Sedangkan pada penelitian Agus Iskandar (2018) mengenai Implementasi Ketentuan Kenaikan Pangkat Tenaga Fungsional Guru yakni ditemukan permasalahan utama mengenai pelaksanaan implementasi kenaikan pangkat belum maksimal dikarenakan sistem koordinasi kedua instansi yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi dan Departemen Pendidikan Nasional tidak berjalan dengan baik sehingga proses penetapan angka kredit berjalan dengan lama.

Pada penelitian menurut Reni dkk (2017) mengenai Implementasi Permenpan Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Jabatan Fungsional Guru Dan Angka Kredit ditemukan permasalahan yaitu lebih dari separuh guru PNS tidak memahami isi Permenpan hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi dari pihak terkait. Separuh dari sisa responden kurang memperhatikan kenaikan pangkat mereka. Sedangkan sebagian kecil guru memahami namun terkendala dalam proses kenaikan pangkat. Apabila ketiga penelitian tersebut dikaitkan dengan temuan pada penelitian ini, maka kesamaan temuan tersebut berupa rumitnya pengusulan kenaikan pangkat bagi jabatan fungsional dimana adanya guru – guru yang kesulitan dalam mengurus penetapan angka kredit (PAK), kemudian adanya guru –guru yang belum memahami serta kurang memperhatikan kenaikan pangkat mereka. Maka diperlukan perhatian Pemerintah Daerah untuk mengatasi permasalahan ini serta adanya kemauan dan kepedulian dari masing – masing pribadi guru mengenai pengurusan kepangkatan mereka karena dampak positif yang didapatkan dari kenaikan pangkat yakni berupa pengembangan karir seperti promosi dalam jabatan serta mendapatkan tambahan penghasilan seperti tunjangan profesi guru yang akan meningkatkan motivasi dan kinerja guru dalam bertugas.

## **IV. KESIMPULAN**

Pengusulan kenaikan pangkat bagi Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Guru di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor berjalan dengan kurang maksimal. Hal ini dinilai dari evaluasi yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan 5 indikator yaitu efektivitas, kecukupan, pemerataan dimana peneliti menemukan faktor – faktor yang menjadi penghambat. Sedangkan pada indikator responsivitas peneliti dapat mengetahui bahwa Pemerintah Daerah merespon baik permasalahan ini dengan menyiapkan beberapa upaya dan pada indikator ketepatan peneliti dapat mengetahui dampak – dampak yang dapat diterima oleh Jabatan Fungsional Guru jika naik pangkat tepat waktu. Berikut merupakan faktor – faktor penghambat dan beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah :

1. Faktor – faktor yang menjadi penghambat pengusulan kenaikan pangkat bagi Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Guru di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor yaitu perubahan regulasi SKP dengan cepat, belum adanya pejabat definitif, belum paham pembuatan SKP baru dan PAK, terkendala sistem informasi.

2. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatasi permasalahan kenaikan pangkat guru yaitu adanya pelantikan pejabat definitif, melakukan sosialisasi pembuatan SKP terbaru, melakukan koordinasi dengan BKPSDM, membentuk program P2K.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan pada pengumpulan data yakni data yang diperoleh cukup lama serta terbatas. Pengumpulan data pada penelitian ini dengan melakukan wawancara, observasi serta dokumentasi mengenai data ataupun dokumen yang diperoleh.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Peneliti menyadari bahwa pada masih awalnya temuan pada penelitian ini sehingga penulis menyarankan dan berharap agar dilakukannya penelitian lanjutan pada lokasi serupa yang berkaitan dengan pengusulan kenaikan pangkat bagi Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Guru agar dapat menemukan hasil yang lebih baik dan mendalam serta dapat menyelesaikan permasalahan ini.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan Terima Kasih terutama ditujukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor terutama kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan menyelesaikan pelaksanaan penelitian ini.



## VI. DAFTAR PUSTAKA

- AG. Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Anang Dwinanta, Rosalina Ginting. 2012. Analisis Pelayanan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus di Kabupaten Semarang). *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Volume II Nomor 1
- Agus Iskandar. 2018. Implementasi Ketentuan Kenaikan Pangkat Tenaga Fungsional Guru (Studi di Kabupaten Kota Bumi Lampung Utara). *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 13 Nomor 1
- Azmi Chairunnisa Alfianty, Aceng Muhtaram Mirfani, Nurdin. 2021. Analisis Penetapan Angka Kredit Kenaikan Jabatan Fungsional Guru Di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Tata Kelola Pendidikan*, Vol.3 Nomor 1
- A.A. Anwar Prabu Mangkunegara. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Cetakan Ke Tujuh*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Budi, Winarno. 2005. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS
- Flippo, Edwin B.. 1988. *Manajemen Personalia*. Jakarta : Penerbit Erlangga
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Reni, Rr. Sri Kartikowati, Nurpit Junus. 2017. Implementasi Permenpan Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Jabatan Fungsional Guru Dan Angka Kredit (Studi Kasus pada Kenaikan Pangkat dan Dampaknya Bagi Guru SDN di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak). *Jurnal Manajemen Pendidikan Penelitian Kualitatif*, .
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Simangunsong, Fernandes. 2017. *Metodologi Penelitian Pemerintah Cetakan ketiga*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Wirawan. 2011. *Evaluasi Teori Model Standar Aplikasi dan Profesi, Contoh Aplikasi Evaluasi Program : Pengembangan Sumber Daya Manusia Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan, Kurikulum, Perpustakaan, dan Buku Tes*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Yenchilia Tresna Damanik, Aufarul Marom. 2016. Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pelatihan Keterampilan Di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tembalang Kota Semarang. Jurnal Administrasi Publik, Volume 5 Nomor 3

